

PASAR RAKYAT SEBAGAI JEMBATAN REKONSILIASI: MEMBANGUN HUBUNGAN MASYARAKAT ANTARA WARGA EKS TIMOR-TIMUR DAN WARGA TIMOR -LESTE

*THE PEOPLE'S MARKET AS A BRIDGE FOR CONCILIATION: BUILDING PUBLIC
RELATIONS BETWEEN THE RESIDENTS OF FORMER EAST TIMOR AND THE
RESIDENTS OF TIMOR-LESTE*

Alexandra Cordanis Ferreira^{1*}, Kristianus Simon H. Molan², Indriyati³

Universitas Katolik Widya Mandira, Indonesia

*Email Correspondence: alexsandracordanis@gmail.com

Abstract

This study aims to see how the people's market of the Motaain PLBN acts as a social space that supports post-conflict reconciliation between Indonesian and Timor Leste citizens. Using a qualitative approach and Pierre Bourdieu's theory of social practice, this study analyzes four main aspects: habitus, capital, arena, and social practice. The findings show that the market is not only an economic space, but also a place where new, more open, and harmonious social relations are built. Buying and selling activities in the market bring together citizens of the two countries regularly, strengthen existing social and cultural capital, and create social practices that support a peaceful and sustainable life together.

Keywords: people's market, Motaain PLBN, reconciliation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pasar rakyat PLBN Motaain berperan sebagai ruang sosial yang mendukung rekonsiliasi pascakonflik antara warga Indonesia dan Timor Leste. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan teori praktik sosial Pierre Bourdieu, penelitian ini menganalisis empat aspek utama: habitus, modal, arena, dan praktik sosial. Temuan menunjukkan bahwa pasar tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga menjadi tempat terbangunnya hubungan sosial yang baru, lebih terbuka, dan harmonis. Aktivitas jual beli di pasar mempertemukan warga dua negara secara rutin, memperkuat modal sosial dan budaya yang ada, serta menciptakan praktik sosial yang mendukung kehidupan bersama yang damai dan berkelanjutan.

Kata kunci: Pasar Rakyat, PLBN Motaain, Rekonsiliasi.

PENDAHULUAN

Rekonsiliasi pascakonflik memerlukan dasar utama berupa trust atau kepercayaan sosial yang menjadi energi utama dalam membangun kembali relasi utama dalam membangun kembali relasi masyarakat (Nutfa & Anwar, 2015). Ini bukan sekadar proses politik atau hukum, melainkan menuntut perubahan sikap mendasar yakni menumbuhkan nilai-nilai toleransi, saling menghargai, dan menolak diskriminasi dalam bentuk apa pun (Broun, 2003). (Janine, 2018) Menyatakan bahwa rekonsiliasi membutuhkan pengakuan akan masa lalu yang menyakitkan, serta komitmen bersama untuk membangun masa depan yang lebih damai tanpa harus melupakan sejarah konflik.

Proses rekonsiliasi tidak hanya menasar individu pelaku atau korban, tetapi juga menyentuh jantung komunitas secara luas. Dalam masyarakat yang pernah mengalami konflik berkepanjangan, prasangka dan ketakutan kolektif sering kali diwariskan lintas generasi. Seperti dijelaskan oleh (Staub, 2006), kekerasan yang telah berlangsung lama

cenderung menciptakan narasi sosial yang mengakar, menjadikan suatu kelompok sebagai “musuh bersama” meskipun tidak semua anggotanya terlibat langsung dalam konflik. Sering kali, dalam konteks konflik berkepanjangan, definisi tentang siapa yang dianggap sebagai musuh menjadi kabur dan meluas. Menunjukkan bahwa dampak konflik tidak hanya mengenai pelaku dan korban langsung (Trubus, 2001). Hal yang lebih mengkhawatirkan adalah ketika stereotip dan narasi permusuhan diwariskan kepada generasi yang bahkan tidak terlibat langsung. (Nurchayyo et al., 2014).menyoroti pentingnya transformasi kesadaran untuk mengatasi warisan kebencian dan membangun perdamaian. Pendekatan yang inklusif dan empatik terbukti krusial dalam mengubah persepsi negatif dan membangun hubungan yang lebih baik.

Karena itu, rekonsiliasi harus dilihat sebagai sebuah proses yang terbuka bagi semua pihak, tidak terbatas hanya pada mereka yang secara langsung terlibat dalam konflik. Pendekatan yang inklusif menjadi penting agar suara dari berbagai latar belakang baik korban, pelaku, maupun pihak netral bisa diakomodasi secara adil. (Staub, 2006) menekankan bahwa keberhasilan rekonsiliasi sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat dapat mendengarkan dan memahami keberagaman pengalaman serta kepentingan yang ada.

Tujuan rekonsiliasi bukan hanya tentang penyelesaian formal dari sebuah konflik, melainkan sebuah perjalanan sosial yang melibatkan pengakuan atas penderitaan yang pernah dialami dan upaya nyata untuk mengubah sikap dari kebencian menjadi pengertian (Staub, 2006) menariknya, proses ini tidak harus menunggu konflik benar-benar usai. (Kusuma et al., 2024)menekankan bahwa rekonsiliasi antara Indonesia dan Timor Leste penting untuk mulai dibangun sejak masa transisi, agar hubungan kedua negara dapat pulih dari luka sejarah dan berkembang ke arah kerja sama yang lebih erat. Dalam pandangan pragmatis, seperti yang diungkapkan (Staub, 2006), rekonsiliasi adalah alat penting untuk membangun kembali relasi sosial dan menciptakan ruang koeksistensi damai dalam masyarakat yang pernah terpecah.

Dalam model rekonsiliasi terdapat dua model yaitu pendekatan budaya lokal seperti ritual adat forum keluarga besar, dan musyawarahb warga berperan penting dalam membangun kembali kepercayaan antar warga pascakonflik rekonsiliasi tidak hanya dilakukan melalui institusi formal negara, tetapi melalui mekanisme sosial budaya yang lebih membumi (Nutfu & Anwar, 2015). Dialog rekonsiliasi khusus diterapkan pada banyak situasi mendukung semua pihak di tingkat psikologis (Janine, 2018).

Proses rekonsiliasi secara khusus terjadi antar eks Timor-Timur dan warga Timor-Leste dan juga warga negara Indonesia yang tinggal di perbatasan . Ada beberapa model proses rekonsiliasi yang terjadi antara ke dua negara yaitu berbentuk budaya dan dialog. Proses rekonsiliasi berbentuk budaya dan dialog tetap dilaksanakan dengan baik oleh kedua Negara hal tersebut dapat ditemukan dengan adanya festival fronteira yang terus diselenggarakan oleh negara timor-leste setiap tahunnya, ditargetkan di tiga kotamadya yaitu, Bobonaro, Covalima dan Oe-cusse Festival fronteira pertama kali diselenggarakan pada tahun 2023 tepatnya pada tanggal 15-18 di bulan November. Festival ini juga untuk mengangkat nilai-

nilai utama, tradisi budaya yang kita miliki untuk memartabatkan masyarakat pulau timur. Festival fronteira di adakan untuk memproyeksikan promosi perdamaian, mempromosikan kolektivitas komunitas dan perdamaian masyarakat melalui aspek budaya dan sejarah yang merefleksikan dan menginspirasi interaksi sosial, berdasarkan prinsip penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Festival fronteira bertujuan dalam hal pertukaran budaya untuk mempromosikan rekonsiliasi dengan tujuan yang pertama, mendorong generasi baru Timor-Leste dan Indonesia untuk berpikir kritis tentang topik-topik yang berkaitan dengan konflik politik di masa lalu, persaudaraan hak asasi manusia, dan rekonsiliasi antara budaya di wilayah tersebut, terutama di daerah perbatasan. Kedua, Mempromosikan budaya dialog antar generasi baru timor-leste dan indonesia melalui produksi dan konten bersama, sejarah dan budaya melalui karya seni dan sastra. Ketiga, mempromosikan pertukaran sebagai ruang untuk kolaborasi bersama antara kedua negara untuk berkontribusi pada keseimbangan narasi sejarah. Penjelasan mengenai festival fronteira diatas dapat menjelaskan bahwa festival fronteira sangat berpengaruh dalam proses rekonsiliasi.

Karena banyaknya upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi konflik yang terjadi di tengah masyarakat salah satunya adalah proses rekonsiliasi yang dilakukan melalui berbagai aspek, maka banyak peneliti terdorong untuk melakukan berbagai kajian tentang rekonsiliasi melalui berbagai penelitian, misalnya penelitian yang dilakukan oleh (Rying Ithout Ears, 2003) dengan judul Menangis tanpa air mata: Dalam upaya mencapai keadilan dan rekonsiliasi di Timor-Leste: Perspektif dan harapan masyarakat (*Crying without tears In Pursuit of Justice and Reconciliation in Timor-Leste: Community Perspectives and Expectations*). Penelitian ini mengeksplorasi harapan dan pengalaman masyarakat Timor-Leste terkait proses keadilan transisi pasca kemerdekaan mereka dari indonesia. Melalui serangkaian diskusi kelompok jurnal ini mengkaji serangkaian harapan, kekhawatiran, dan opini yang saling terkait mengenai isu kekerasan dan konflik, pemulihan kebenaran, keadilan, akuntabilitas, rekonsiliasi, dan pengampunan. Secara keseluruhan jurnal ini memberikan gambaran tentang harapan dan tantangan yang dihadapi Timor-Leste dalam membangun negara merdeka dan demokratis. Jurnal ini menegaskan pentingnya proses keadilan transisi yang efektif untuk mencapai perdamaian dan rekonsiliasi yang berkelanjutan di negara tersebut.

Ada pula penelitian yang dilakukan oleh (Turquel, n.d.) dengan judul Rekonsiliasi: komitmen bangsa untuk maju (*Reconciliation: A Nation commitment to move forward*). Jurnal ini mencatat kecenderungan balas dendam sebagai tren baru yang mengancam stabilitas dan kemajuan Timor-leste. Ia menggarisbawahi pentingnya mengakhiri siklus dendam dan permusuhan untuk mencapai perdamaian, stabilitas, dan pembangunan. Jurnal ini menawarkan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi tantangan rekonsiliasi, mencakup pendekatan sosial budaya, sosial politik, sosial ekonomi, dan kepemimpinan. Turquel mengingatkan bahwa tantangan dan peluang baru harus di hadapi untuk mewujudkan pembahasan rakyat Timor-Leste dari perang, kelaparan, dan penindasan menuju masa depan yang baik.

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga membahas terkait proses rekonsiliasi yang pernah terjadi di berbagai tempat namun penelitian sebelumnya belum menelaah fenomena tersebut dengan menggunakan proses rekonsiliasi dalam bentuk budaya yaitu pasar rakyat. Pasar rakyat merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli yang ditata dan dikelola oleh pemerintah, swasta, ataupun badan usaha, dimana pasar rakyat itu sendiri sering disebut pasar tradisional. Peran pasar rakyat juga membantu meningkatkan kesempatan kerja, membantu meningkatkan pendapatan masyarakat, dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam proses rekonsiliasi itu sendiri peran pasar rakyat bukan hanya itu saja melainkan juga sebagai jembatan rekonsiliasi bagi negara Timor-Leste dan Indonesia. Pasar rakyat dapat menjadi tempat bertemunya masyarakat eks Timor Timur dan Timor-Leste. Dengan adanya pasar rakyat dapat membantu membangun hubungan baik antara masyarakat eks Timor Timur dan warga Timor-Leste. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengonstruksi pasar rakyat sebagai arena praksis rekonsiliasi sosial pasca-konflik, menggunakan teori praktik sosial Pierre Bourdieu. Pendekatan ini memposisikan pasar rakyat bukan semata-mata sebagai ruang ekonomi, melainkan sebagai arena sosial tempat interaksi simbolik, pertukaran modal sosial, serta transformasi habitus antara warga eks-Timor Timur dan warga Timor Leste berlangsung secara alami dan berkelanjutan. Melalui aktivitas keseharian di pasar, seperti jual beli dan interaksi antarwarga, terjadi proses pembentukan kepercayaan, solidaritas, dan koeksistensi baru yang memperkuat rekonsiliasi secara mikro. Dengan demikian, penelitian ini memperluas pemahaman tentang rekonsiliasi yang selama ini cenderung bersifat institusional atau legal, ke arah praksis sosial berbasis budaya dan ekonomi rakyat, yang lebih membumi dan kontekstual dalam kehidupan masyarakat perbatasan.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguraikan secara efektif, mengidentifikasi dan untuk menemukan kendala yang terjadi selama proses rekonsiliasi ini berlangsung. Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan masukan bagi pemerintah terkait regulasi dan fasilitas di pasar rakyat yang menjadi jembatan rekonsiliasi antara masyarakat Indonesia dan Timor Leste.

TINJAUAN PUSTAKA

Pasar rakyat tidak hanya berperan sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial yang memfasilitasi interaksi antarwarga. Dalam konteks pasca-konflik, seperti antara warga eks-Timor Timur dan warga Timor Leste, pasar rakyat tidak hanya berfungsi sebagai pusat ekonomi saja tetapi juga menjadi ruang sosial yang mempertemukan sebagai latar belakang masyarakat dan memperkuat relasi sosial melalui interaksi harian antarwarga (H & W, 2020). Oleh karena itu, pasar rakyat dapat menjadi sarana rekonsiliasi sosial berbasis interaksi informal yang berulang dan setara. Pierre Bourdieu mengembangkan teori praktik sosial melalui tiga konsep utama, yaitu habitus, modal, dan arena (Bottero et al., 2009). Seperti yang dijelaskan (Benson & Fowler, 1999), konflik dalam arena sosial merupakan bentuk ekspresi simbolik dari struktur kekuasaan yang terus bergerak dan berubah seiring perubahan relasi antaraktor, dan justru dapat menjadi pemicu

bagi transformasi sosial dan pembentukan pola interaksi baru yang lebih adaptif. Melalui pertukaran dan interaksi sosial, pasar rakyat dapat menjadi arena rekonsiliasi yang mempertemukan berbagai kepentingan dan mendorong pembentukan solidaritas baru. Oleh karena itu, peneliti menjadikan pasar rakyat sebagai bahan kajian untuk melihat bagaimana praktik sosial di dalamnya mampu menjembatani konflik dan membentuk keharmonisan sosial.

Habitus

Habitus menurut Pierre Bourdieu adalah sistem disposisi atau kecenderungan yang tertanam dalam diri individu melalui proses sosialisasi, yang membentuk cara berpikir, merasakan, dan bertindak (Schirato & Roberts, 2020). Habitus dipahami sebagai sistem disposisi atau kecenderungan bertindak yang terbentuk dari pengalaman hidup dan struktur sosial yang dialami individu secara historis, sehingga membentuk cara berpikir dan bertindak yang relatif konsisten dalam konteks sosial tertentu (Bottero et al., 2009). Konsep habitus dipresentasikan melalui indikator pola pikir dan tindakan sosial warga yang berbentuk dari pengalaman masa lalu. Subindikatornya meliputi kebiasaan warga dalam berinteraksi dengan kelompok lain, cara pandang terhadap perbedaan sosial, dan sikap terbuka terhadap keberagaman.

Modal

Menurut Bourdieu merupakan sumber daya yang dapat digunakan individu untuk mendapatkan posisi sosial yang strategis. Terdapat empat jenis modal (Musrrofa, 2015) Modal ekonomi (pendapatan, aset, kekayaan material), Modal sosial (jaringan dan koneksi sosial yang dimiliki), Modal budaya (tingkat pendidikan, pengetahuan, keterampilan), dan Modal simbolik (status, kehormatan, atau pengakuan sosial). Dalam konteks pasar rakyat sebagai arena sosial pascakonflik, keempat jenis modal tersebut menjadi instrumen penting dalam membangun kembali jaringan sosial dan ekonomi yang inklusif. Indikator modal meliputi kepemilikan terhadap keempat jenis modal di atas, serta sejauh mana modal tersebut digunakan dalam interaksi sosial dan Subindikatornya antara lain jaringan sosial dan kepercayaan, pengetahuan dan keterampilan, akses terhadap sumber daya ekonomi, serta pengakuan sosial antar kelompok.

Arena (*Field*)

Arena (*field*) adalah ruang sosial di mana individu-individu atau kelompok saling berkompetisi untuk mendapatkan pengaruh atau legitimasi, dan setiap arena memiliki aturan permainan atau logika internal tersendiri (Karnanta, 2013). Dalam konteks penelitian ini, pasar rakyat diposisikan sebagai arena sosial tempat bertemunya warga dari latar belakang konflik historis, di mana mereka melakukan negosiasi ulang terhadap identitas, relasi kuasa, dan kepentingan ekonomi. konsep arena dioperasionalkan melalui tiga indikator utama yaitu pertama kehadiran dan partisipasi kelompok sosial yang beragam di pasar rakyat; kedua akses yang setara terhadap ruang dan sumber daya; serta ketiga keberadaan aturan sosial yang mengatur interaksi antarwarga. Masing-masing indikator ini dijabarkan dalam

subindikator berikut: representasi kelompok pascakonflik dalam aktivitas pasar, keterlibatan kelompok marginal dalam kegiatan ekonomi, peluang ekonomi yang terbuka bagi semua warga, norma informal antar pedagang dan pembeli, peran pengelola pasar sebagai fasilitator sosial, serta mekanisme penyelesaian konflik mikro yang muncul dalam aktivitas pasar. Dengan demikian, pasar rakyat sebagai arena sosial tidak hanya menjadi ruang ekonomi, tetapi juga medan sosial tempat rekonsiliasi dan transformasi hubungan sosial berlangsung secara alami dan berkesinambungan.

Praktik

Praktik sosial merupakan hasil interaksi dinamis antara habitus, modal, dan arena. Praktik tidak semata-mata ditentukan oleh kehendak individu (agensi) ataupun oleh struktur, melainkan oleh relasi yang terus-menerus terbentuk di antara ketiganya (Musarrofa, 2015). Praktik muncul dari bagaimana seseorang bertindak secara spontan dalam situasi sosial tertentu, dengan mengandalkan pengalaman hidup (habitus), sumber daya yang dimiliki (modal), dan aturan main yang berlaku dalam suatu arena (Musarrofa, 2015). praktik bersifat historis dan kontekstual. Ia tidak muncul dari ruang hampa, tetapi dari proses internalisasi pengalaman sosial masa lalu yang dibawa ke dalam medan sosial yang terus berubah. (Bottero et al., 2009) Praktik sosial yang dimaksud dalam penelitian ini mencakup tiga indikator utama: interaksi ekonomi lintas kelompok, komunikasi sosial, serta koordinasi dan pemeliharaan ketertiban bersama. Ketiga indikator ini dijabarkan secara lebih rinci dalam subpraktik yang nyata dalam keseharian warga.

Dalam kerangka ini, pasar rakyat diposisikan sebagai arena sosial tempat warga dengan latar belakang konflik historis saling berinteraksi. Habitus yang terbentuk selama konflik perlahan dapat berubah melalui praktik-praktik sosial baru yang muncul dalam interaksi ekonomi dan budaya di pasar rakyat. Pertukaran modal sosial dalam bentuk kepercayaan, solidaritas, dan toleransi menjadi dasar penting dalam membangun rekonsiliasi dan koeksistensi damai. Dengan menggunakan teori praktik sosial Bourdieu, pasar rakyat dapat dilihat sebagai ruang di mana praktik sosial baru terbentuk melalui interaksi sehari-hari. Dalam ruang ini, warga eks-Timor Timur dan Timor Leste melakukan negosiasi ulang atas identitas, stereotip, dan relasi kuasa yang sebelumnya terbentuk akibat konflik. Aktivitas di pasar, seperti jual beli, berbagi informasi, dan menjalin relasi dagang, menjadi praktik sosial yang memungkinkan terbentuknya habitus baru yang lebih inklusif dan kooperatif. Modal sosial yang berkembang di pasar rakyat menjadi jembatan penting bagi proses rekonsiliasi dari bawah (bottom-up), yang bersifat

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus untuk memahami fenomena sosial secara mendalam dalam konteks kehidupan nyata. (Musianto, 2002). Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan secara tematik yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data dikoding berdasarkan konsep-konsep utama dalam

teori praktik sosial Bourdieu, seperti habitus, modal, arena, dan praktik. Pemilihan lokasi penelitian di pasar rakyat Perbatasan Motaain dilakukan secara purposive, karena pasar ini merupakan titik strategis interaksi antara warga eks-Timor Timur dan warga Timor Leste. Informan dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria: terlibat aktif dalam aktivitas pasar dan memiliki pengalaman langsung dalam interaksi sosial lintas kelompok. Sebanyak delapan informan dilibatkan, terdiri atas PLBN Motaain (Pos Lintas Batas Negara), Imigrasi Motaain, Tentara TNI Motaain, Bappeda Kabupaten Belu, Kepala desa Silawan, Kepala desa Batugade, Administrador Balibo (Camat), dan CNC! I.P (Centro Nasional Chega! institutu públiku).

Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur dengan pertanyaan terbuka, sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan respons narasumber untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai pengalaman dan pandangan mereka terkait interaksi di pasar rakyat.

Observasi partisipatif dilakukan dengan peneliti terlibat langsung dalam aktivitas sehari-hari di pasar untuk memahami dinamika sosial dan interaksi yang terjadi antara warga eks-Timor Timur dan warga Timor Leste. Peneliti mencatat perilaku, interaksi, dan suasana pasar yang mencerminkan hubungan antar kelompok.

Dokumentasi dilakukan dengan merekam wawancara dan mengambil gambar untuk mendukung data yang diperoleh.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Batas negara sering kali dianggap sebagai garis pemisah yang memisahkan dua wilayah, tetapi dalam kenyataannya, batas-batas ini dapat berfungsi sebagai ruang interaksi sosial yang kompleks. Salah satu contoh nyata dari fenomena ini dapat ditemukan di kawasan PLBN (Pos Lintas Batas Negara) Motaain, yang terletak di perbatasan antara Indonesia dan Timor-Leste. Setiap minggu, di kawasan ini diadakan pasar rakyat yang bukan hanya menjadi tempat transaksi ekonomi, tetapi juga merupakan ruang sosial yang mempertemukan kembali dua komunitas yang sebelumnya mengalami konflik politik dan sejarah. Pasca perpisahan politik pada tahun 1999, masyarakat di kedua sisi perbatasan perlahan-lahan membangun kembali hubungan mereka melalui aktivitas sosial yang bersifat spontan dan damai. Pasar rakyat ini menjadi simbol penting dari proses rekonsiliasi sosial yang tumbuh dari bawah, di mana interaksi antarwarga membentuk struktur sosial baru yang lebih terbuka dan damai. Dalam penelitian ini, teori Pierre Bourdieu digunakan untuk menganalisis fenomena ini dengan mengukur empat aspek penting: habitus, modal sosial, arena, dan praktik sosial.

Perubahan Pola Pikir dan Kebiasaan Pascakonflik

Setelah berakhirnya konflik, warga di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor-Leste menunjukkan perubahan pola pikir dan kebiasaan yang signifikan dalam kehidupan sosial mereka. Dulu, mungkin terdapat ketegangan dan kecurigaan antara warga kedua negara,

namun seiring berjalannya waktu, sikap tersebut mulai berubah. Warga dari kedua negara kini saling menyapa, berdagang, dan bahkan menjaga hubungan kekeluargaan melalui pasar rakyat di PLBN Motaain. Anak-anak muda di Timor-Leste tumbuh tanpa trauma besar akibat konflik dan lebih aktif dalam membangun interaksi sosial. Perubahan pola pikir ini terjadi secara alami, tanpa adanya paksaan, melainkan melalui pengalaman langsung yang mengajarkan mereka untuk saling percaya dan berinteraksi dengan cara yang damai. Pasar rakyat menjadi ruang penting dalam mempercepat perubahan ini, karena di sinilah warga berlatih untuk berinteraksi secara damai dan membangun hubungan yang lebih harmonis.

Modal Sosial

Modal sosial berperan penting dalam hubungan antarwarga di pasar rakyat PLBN Motaain. Kepercayaan, kekeluargaan, dan saling membantu menjadi fondasi utama dalam interaksi sosial di pasar ini. Banyak warga dari Indonesia dan Timor-Leste yang memiliki ikatan darah atau hubungan adat, yang telah mempererat hubungan mereka sejak lama. Ikatan ini tidak hanya terbatas pada silaturahmi, tetapi juga menjadi landasan bagi terbentuknya hubungan sosial yang lebih harmonis dan saling menghargai. Sebagai contoh, pedagang dari kedua negara tidak ragu untuk memberikan kelonggaran pembayaran kepada pelanggan yang sudah menjadi langganan, baik itu utang kecil atau penundaan pembayaran. Interaksi yang terjadi di pasar ini lebih dari sekadar transaksi ekonomi; ia mencerminkan nilai-nilai sosial yang lebih mendalam, seperti saling membantu dan menjaga ketertiban bersama. Modal sosial yang kuat ini menciptakan suasana pasar yang aman dan nyaman bagi semua pihak yang terlibat.

Modal Budaya

Modal budaya juga berperan penting dalam mempererat hubungan antarwarga di pasar rakyat PLBN Motaain. Kesamaan bahasa, yaitu bahasa Tetun dan bahasa Indonesia, memudahkan komunikasi antara warga dari kedua negara. Selain itu, nilai-nilai budaya lokal seperti saling menghormati, sopan santun, dan penghormatan terhadap simbol adat juga memperkuat kedekatan emosional antara mereka. Hal ini menciptakan suasana yang lebih akrab dan nyaman, karena warga merasa bahwa mereka dipahami secara budaya. Gaya berdagang yang mirip dan cara-cara berinteraksi yang saling menghormati memperlihatkan adanya kesamaan budaya yang menghubungkan kedua belah pihak. Modal budaya ini memudahkan proses rekonsiliasi sosial dan meningkatkan kualitas hubungan antarwarga.

Modal Ekonomi

Modal ekonomi menjadi aspek penting dalam pasar PLBN Motaain. Pasar ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai sumber pendapatan utama bagi banyak warga lokal. Barang-barang yang diperdagangkan di pasar ini, seperti hasil pertanian, ikan, kerajinan tangan, dan berbagai kebutuhan lainnya, menjadi sumber mata pencaharian bagi warga Indonesia dan Timor-Leste. Meskipun pasar ini tidak lagi memiliki pengunjung sebanyak sebelumnya karena pembatasan yang diberlakukan oleh

pihak Timor-Leste, pasar tetap berfungsi dengan baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi banyak orang. Selain itu, sistem tarif yang jelas dan terjangkau juga menjadi faktor yang mendukung keberlanjutan pasar ini. Penggunaan mata uang yang berbeda antara Indonesia (Rupiah) dan Timor-Leste (Dolar Amerika) juga tidak menghalangi transaksi, karena kehadiran Bank NTT di pasar membantu menstabilkan transaksi mata uang dan memudahkan pertukaran antara kedua negara.

Modal Simbolik

Modal simbolik juga memainkan peran penting dalam menjaga hubungan antarwarga di pasar rakyat PLBN Motaain. Institusi seperti PLBN, Imigrasi, Tentara, dan Kepala Desa dipandang sebagai lembaga yang netral dan membantu, bukan sebagai otoritas yang menakutkan. PLBN, sebagai simbol negara, hadir dengan pendekatan yang lebih humanis dan fungsional, bukan sebagai kekuatan yang menekan atau membatasi warga. Sebaliknya, PLBN berperan sebagai pengelola ruang sosial bersama yang memfasilitasi interaksi antarwarga dari kedua negara. Hal ini menciptakan suasana yang lebih terbuka dan membangun rasa percaya di kalangan masyarakat.

Keadilan Akses dan Partisipasi Sosial di Pasar Rakyat

Pasar rakyat PLBN Motaain dikelola secara formal oleh negara, namun tetap memberikan akses yang adil bagi semua warga untuk berpartisipasi. Pasar ini diatur oleh lembaga negara seperti BNPP, Kementerian Keuangan, dan KPKNL, tetapi tetap memberikan ruang bagi masyarakat lokal maupun warga lintas negara untuk berinteraksi. Warga Indonesia, terutama dari desa-desa sekitar seperti Silawan, diberikan akses penuh untuk berdagang di pasar, sementara warga Timor-Leste juga dapat berpartisipasi sebagai pembeli tanpa memerlukan paspor. Akses ini memudahkan interaksi antara kedua belah pihak dan membuka peluang bagi mereka untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial-ekonomi secara aman dan tertib. Dalam hal ini, pasar rakyat PLBN Motaain menjadi contoh nyata bahwa keadilan akses dan partisipasi sosial dapat tercapai meskipun terdapat perbedaan negara.

Interaksi Nyata dalam Aktivitas Pasar

Praktik sosial yang terjadi di pasar tidak hanya terbatas pada aktivitas jual beli, tetapi juga mencerminkan hubungan antarwarga yang saling mendukung. Warga dari kedua negara saling membantu dalam berbagai hal, mulai dari membawa barang, berbagi informasi, hingga menjaga anak-anak saat orang tua sedang berbelanja. Selain itu, terdapat juga praktik utang-piutang yang menunjukkan adanya kepercayaan sosial yang kuat antarwarga. Semua praktik ini memperlihatkan bahwa interaksi di pasar tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga membangun hubungan sosial yang lebih dalam dan lebih kuat. Pasar rakyat PLBN Motaain menunjukkan bahwa rekonsiliasi sosial dapat tumbuh tidak hanya melalui kebijakan besar, tetapi juga melalui aktivitas sehari-hari yang terus-menerus dan tulus dilakukan oleh warga.

Pasar rakyat PLBN Motaain menjadi ruang penting dalam rekonsiliasi sosial pasca-konflik antara Indonesia dan Timor-Leste. Proses rekonsiliasi ini tumbuh secara alami melalui interaksi sosial yang berlangsung terus-menerus dan menciptakan hubungan yang lebih terbuka, damai, dan saling menghargai. Dengan menggunakan kerangka teori Pierre Bourdieu, kita dapat melihat bahwa perubahan pola pikir, modal sosial, modal budaya, dan modal ekonomi semuanya berkontribusi pada terciptanya ruang sosial yang inklusif dan harmonis di pasar rakyat. Interaksi nyata yang terjadi di pasar ini memperlihatkan bahwa perdamaian tidak selalu berasal dari kebijakan besar, melainkan bisa dimulai dari aktivitas kecil yang dilakukan dengan tulus oleh warga. Pasar rakyat PLBN Motaain menjadi bukti bahwa rekonsiliasi sosial dapat tumbuh dari bawah, melalui kebiasaan sehari-hari yang terus berlangsung dan saling mendukung antarwarga.

KESIMPULAN

Pasar rakyat di kawasan PLBN Motaain tidak hanya merupakan ruang ekonomi, tetapi telah berkembang menjadi arena sosial yang memainkan peran penting dalam proses rekonsiliasi pascakonflik antara warga Indonesia, khusus eks Timor-Timur, dan Warga Timor-Leste. Melalui aktivitas pasar yang rutin dan alami, warga dari dua negara yang pernah berseberangan kini membentuk pola hubungan baru yang lebih terbuka, saling percaya, dan bersifat kooperatif. Dengan menggunakan teori sosial Pierre Bourdieu, penelitian ini berhasil memetakan bagaimana perubahan habitus, pemanfaatan berbagai bentuk modal, struktur arena yang adil, dan praktik sosial sehari-hari, saling terkait dalam menciptakan suasana damai dan stabil di perbatasan. Hubungan sosial tidak dibentuk secara instan atau melalui program besar, tetapi tumbuh pelan-pelan dari bawah dari interaksi sederhana yang terus berulang. Pasar rakyat menjadi ruang di mana warga bisa hadir bukan sebagai wakil negara, tetapi sebagai manusia biasa yang saling menyapa, berdagang, bercanda, dan berbagi cerita. Inilah bentuk rekonsiliasi yang paling sejati rekonsiliasi yang tidak hanya terbatas pada simbol atau lembaga, tetapi benar-benar menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat ke depan. Tidak hanya dengan membangun infrastruktur fisik, tetapi juga dengan menciptakan kebijakan yang berpihak pada keterbukaan akses, partisipasi warga, dan pengelolaan yang inklusif. Karena dari pasar rakyat inilah, rekonsiliasi yang sesungguhnya sedang bertumbuh dalam diam, dalam kebiasaan, dan dalam hubungan yang dibangun dengan tulus.

DAFTAR PUSTAKA

- Benson, R., & Fowler, B. (1999). Pierre Bourdieu and Cultural Theory: Critical Investigations. *Social Forces*, 78(1), 366. <https://doi.org/10.2307/3005802>
- Bottero, W., Lambert, P. S., Prandy, K., & McTaggart, S. (2009). Occupational structures: The stratification space of social interaction. In *Quantifying Theory: Pierre Bourdieu*. https://doi.org/10.1007/978-1-4020-9450-7_11
- Broun, K. (2003). *Reconciliation – Theory and Practice for Development Cooperation* (Issue September).

- H, I. M., & W, N. I. K. (2020). Penataan Pasar Rakyat dan Pasar Modern di Kota Surabaya. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 2(2), 56–60. <https://doi.org/10.33005/jdep.v2i2.92>
- Janine, H. (2018). Waitangi Tribunal. In *Max Planck Encyclopedia of International Procedural Law*. <https://doi.org/10.1093/law-mpeipro/e3045.013.3045>
- Kusuma, Y. S. A., Jauhari, N., & Subekti, A. (2024). Development of E-MORPITT (Electronic Module of the 1975 East Timor Integration Struggle-Reconciliation) for History Learning. *IJHE: Indonesian Journal of History Education*, 9(1), 53–64.
- Musarrofa, I. (2015). Mekanisme Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Kekerasan Simbolik Pierre Bourdieu. *Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(2), 459–478. <http://ajiindonesia.or.id/read/article/berita/163/masih-ada-kekerasan-pada->
- Musianto, L. S. (2002). Perbedaan Pendekatan Kuantitatif Dengan Pendekatan Kualitatif Dalam Metode Penelitian. *Jurnal Manajemen Dan Wirausaha*, 4(2), 123–136. <https://doi.org/10.9744/jmk.4.2.pp.123-136>
- Nurchahyo, A., Hartono, Y., & Soebijantoro. (2014). Model Rekonsiliasi Kultural untuk Mengatasi Konflik Sosial antar Perguruan Silat di Madiun. *Jurnal Studi Sosial*, 6(2), 67–73.
- Nutfah, M., & Anwar, S. (2015). Membangun Kembali Perdamaian : Rekonsiliasi Konflik Komunal Berbasis Trust. *Perennial*, 01(01), 133–142. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/perennial/article/view/8>
- Rying ithout ears*. (2003). *August*.
- Schirato, T., & Roberts, M. (2020). The logic of practice. *Bourdieu*, 208–239. <https://doi.org/10.4324/9781003115083-9>
- Staub, E. (2006). Reconciliation after genocide, mass killing, or intractable conflict: Understanding the roots of violence, Psychological recovery, and steps toward a general theory. *Political Psychology*, 27(6), 867–894. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2006.00541.x>
- Trubus. (2001). Penyelesaian Konflik Sosial : Belajar dari Pengalaman Afrika Selatan. *Symposium Dan Lokakarya Internasional II, “Globalisasi Dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru “*, 1–16.
- Turquel, J. (n.d.). *Reconciliation: A commitment to move forward*. 1–4.

